Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan
Untuk Mendukung Kebijakan Hilirisasi Kelapa Sawit
Eka Desi Susanti, Dyah Woro Untari, S.P., M.P., Ph.D. ; Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN TEKNOPOLITAN UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN HILIRISASI KELAPA SAWIT

INTISARI

Pembangunan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan merupakan bagian dari mendukung hilirisasi kelapa sawit yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat transformasi ekonomi daerah, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja. Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dipilih sebagai salah satu daerah percontohan implementasi kebijakan tersebut melalui pembangunan Kawasan Teknopolitan yang diarahkan sebagai pusat riset, inovasi, dan pengembangan industri berbasis kelapa sawit. Kawasan Teknopolitan direncanakan dibangun 7 zona, dengan Zona Research and Development (R&D) seluas sekitar 180 hektar yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi kebijakan pembangunan Kawasan Teknopolitan yang dilakukan pemerintah daerah, serta memahami bagaimana kebijakan tersebut dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif penelitian kebijakan ex-ante, yaitu menganalisis dinamika komunikasi dan respons sosial pada tahap awal implementasi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan terkait pembangunan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. Analisis dilakukan menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell untuk memahami strategi komunikasi kebijakan, serta teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann untuk menjelaskan proses pembentukan makna kebijakan dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah daerah dalam pembangunan Kawasan Teknopolitan cenderung berlangsung melalui pola komunikasi yang bersifat top-down dan lebih menekankan pada penyampaian informasi kebijakan melalui regulasi formal, forum kelembagaan, serta kegiatan sosialisasi terbatas. Dalam perspektif konstruksi sosial, kebijakan pembangunan kawasan mengalami proses dialektika antara narasi pembangunan yang dibangun pemerintah dengan pengalaman sosial masyarakat. Pemerintah mengeksternalisasikan pembangunan Teknopolitan sebagai proyek strategis hilirisasi sawit melalui kebijakan, regulasi, dan pembangunan infrastruktur kawasan. Kebijakan tersebut kemudian mengalami objektivasi melalui pelembagaan regulasi dan penetapan kawasan sebagai aset pemerintah daerah yang memperkuat legitimasi pembangunan. Namun pada tahap internalisasi, masyarakat menunjukkan respons yang ambivalen, ada yang memiliki harapan terhadap peluang ekonomi hingga munculnya kekhawatiran terkait akses lahan, keterbatasan informasi, serta ruang partisipasi yang dirasakan belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi pembangunan pemerintah dan pengalaman sosial masyarakat.

Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan
Untuk Mendukung Kebijakan Hilirisasi Kelapa Sawit
Eka Desi Susanti, Dyah Woro Untari, S.P., M.P., Ph.D. ; Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Kawasan Teknopolitan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan kebijakan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan serta kemampuan pemerintah dalam membangun proses pembangunan yang dialogis dan partisipatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat model komunikasi kebijakan yang lebih dialogis dan transparan, memperbaiki mekanisme pengelolaan lahan dan kompensasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam ekosistem hilirisasi kelapa sawit agar pembangunan kawasan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat.

Kata kunci: *komunikasi kebijakan, konstruksi sosial, teknopolitan, hilirisasi sawit, partisipasi masyarakat.*

Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan
Untuk Mendukung Kebijakan Hilirisasi Kelapa Sawit
Eka Desi Susanti, Dyah Woro Untari, S.P., M.P., Ph.D. ; Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

COMMUNICATION STRATEGY OF THE LOCAL GOVERNMENT OF PELALAWAN REGENCY IN THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOPOLITAN AREA TO SUPPORT THE DOWNSTREAMING POLICY OF PALM OIL

ABSTRACT

The development of the Technopolitan Area in Pelalawan Regency forms part of Indonesia's broader palm oil downstreaming agenda, which seeks to increase commodity value-added, strengthen regional economic transformation, and create new opportunities for investment and employment. Pelalawan Regency, located in Riau Province, was selected as one of the pilot regions for the implementation of this policy through the establishment of a Technopolitan Area designed to serve as a center for research, innovation, and palm oil-based industrial development. The planned area consists of seven development zones, including a Research and Development (R&D) Zone covering approximately 180 hectares, which is expected to enhance regional competitiveness while generating economic benefits for local communities.

This study aims to examine the policy communication strategy employed by the local government in the development of the Technopolitan Area and to understand how the policy is socially constructed by the community through the processes of externalization, objectification, and internalization. A qualitative approach was adopted using an ex-ante policy research perspective, focusing on communication dynamics and social responses during the early stages of policy implementation. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of policy documents related to the development of the Technopolitan Area in Pelalawan Regency. The analysis draws upon Harold D. Lasswell's communication model to explore policy communication strategies and Berger and Luckmann's social construction theory to explain how policy meanings are formed and negotiated within society.

The findings indicate that the local government's communication strategy has largely followed a top-down approach, emphasizing the dissemination of policy information through formal regulations, institutional forums, and limited public outreach activities. From a social construction perspective, the development policy has evolved through a dialectical process between the government's development narrative and the lived experiences of local communities. The government externalized the Technopolitan Area as a strategic project supporting palm oil downstreaming through policy formulation, regulatory frameworks, and infrastructure planning. This narrative was subsequently objectified through the institutionalization of regulations and the designation of the area as a regional government asset, thereby reinforcing the legitimacy of the project. However, at the stage of internalization, community responses were found to be ambivalent. While some residents expressed optimism regarding potential economic opportunities, others raised concerns about land access, limited information, and the perceived lack of meaningful participation in the planning process. These findings suggest the existence of a gap between the government's development discourse and the social realities experienced by local communities.

Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan
Untuk Mendukung Kebijakan Hilirisasi Kelapa Sawit
Eka Desi Susanti, Dyah Woro Untari, S.P., M.P., Ph.D. ; Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

This study concludes that the success of the Technopolitan Area development depends not only on infrastructure readiness and economic policy support but also on the effectiveness of policy communication and the government's ability to foster a more dialogic and participatory development process. Strengthening transparent communication mechanisms, improving land management and compensation arrangements, and increasing local community involvement within the palm oil downstreaming ecosystem are therefore essential for building stronger social legitimacy and ensuring the long-term sustainability of the development initiative.

Keywords: *policy communication; social construction; technopolitan development; palm oil downstreaming; community participation.*